



## INTISARI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dituntut suatu sistem yang dulunya sentralistik ke sistem desentralistik melalui otonomi yang luas dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah perlu diciptakan suatu strategi peningkatan penerimaan daerah yang salah satunya adalah perlunya pengelolaan PBB dengan baik, sehingga menjadi salah satu penerimaan daerah yang potensial di Kabupaten Tegal di masa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan, kontribusi, potensi dan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tegal. Alat analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan, kontribusi, dan potensi.

Hasil analisisnya menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan selama periode pengamatan sebesar 6,06 persen, sedangkan kontribusi PBB sektor perdesaan dan perkotaan terhadap APBD rata-rata hanya sebesar 4,79 persen yang berarti masih relatif kecil, rata-rata pencapaian target yang ditetapkan sebesar 103,01 persen. Berdasarkan potensi yang diketahui berarti target masih dapat ditingkatkan. Selanjutnya sesuai hasil pengamatan bahwa potensi tahun 2002 sebesar Rp6.708.410.853,00 atau terdapat selisih Rp393.938.853,00 atau 6,24 persen dengan yang ditetapkan KP PBB Tegal. Prospek penerimaan PBB terus akan meningkat sejalan dengan NJOP, pertumbuhan penerimaan akan lebih baik lagi apabila pendataan subjek/objek pajak dilakukan secara akurat setiap tahun dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola serta koordinasi terus ditingkatkan.





## ABSTRACT

Based on The Regulation numbering 22, 1999 on Local Government and the Regulation numbering 25, 1999 on Financial Balancing between central and local governments, it must be a change from a centralistic into a decentralistic system through expanding and responsible autonomy. In the frame to finance the implementation of local autonomy, it is necessary to a strategy of increasing local revenues. In this relation, among other things, it is necessary to manage Land and Building Tax (PBB) in a good way so that it becomes one of local revenue potencial of Tegal District in the future.

This research aims at looking at levels of growth, contribution, potency and effort to increase from Land and Building Tax (PBB) in rural and urban sectors in Tegal Distric. The analysis instruments used are : growth, contribution, potency analysis.

Analysis result shows that the average of income growth of Land and Building Tax in rural and urban sectors since observation period is 6,06 percent ; and the contribution of Land and Building Tax in rural and urban sectors to Budget of Local revenue and Expenditure (APBD) is only in the average of 4,79 percent, meaning that it is still low. Whereas the average targetted is 103,01 percent. Based on the known potency this means that the target can be increased. Furthermore, in accordance with potency result for 2002, it shows Rp6.708.410.853 or slack Rp393.938.853 or 6,24 percent with potency KP PBB Tegal. This means that the income prospect will continuously increase, the growth of income will be better if data collection is accurately carried out every year ; human resources quality of this division is increased; and coordination is continuously improved.

